

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan rencana kerja (RENJA) tahun 2023 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan prioritas yang tertuang pada rencana strategis (RENSTRA) tahun 2018–2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tanah Laut, juga dengan memperhatikan ketersediaan dana Pemerintah Daerah kabupaten Tanah Laut. Sebelumnya penyusunan Renja SKPD ini juga mengacu pada evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021 sampai bulan April tahun 2022

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tanah Laut yang dapat kami persembahkan, dengan harapan masukan dan saran serta petunjuk. Akhimya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tanah Laut mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik – baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Pelaihari, Juli 2022

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANAH LAUT,

Andris Evony, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19790928 199711 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1.1
1.1 Latar Belakang	1.1
1.2 Landasan Hukum	1.2
1.3 Maksud dan Tujuan	1.6
1.4 Sistematika Penulisan	1.6
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu	2.1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	2.1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	2.14
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	2.15
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	2.16
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	3.1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Propinsi	3.1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	3.2
3.3 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023	3.4
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	4.1
BAB V Penutup	5.1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja SKPD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, renstra SKPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra SKPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Rancangan renja SKPD dibahas pada forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyesuaian program dan kegiatan

sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD berdasarkan kepada ketersediaan dana Pemerintah Daerah. Renja SKPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)

18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Nomor 1114 Tahun 2019);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor G50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);

29. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 31)

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah, Dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

33. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 85 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;

34. Peraturan Daerah Tanah Laut nomor 02 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023;

35. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) adalah sebagai berikut:

- Memberikan acuan bagi SKPD Bappeda Kabupaten Tanah Laut agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD Bappeda;
- Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang dalam penyusunan RKA SKPD Bappeda;
- Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan	Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.
BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu	Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
BAB III. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan	Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra SKPD.
BAB IV. Penutup	Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pada saat disusunnya Renja Bappeda Tahun 2023 ini, pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 masih berjalan, sehingga capaian realisasi renja Tahun 2022 masih sangat kecil. Dalam konteks melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja ini juga dapat melihat pada realisasi sampai dengan akhir tahun 2021. Hal yang menjadi esensinya sejauh mana capaian sampai dengan tahun 2021 dan target apa yang akan dicapai pada tahun 2023, sehingga dapat direncanakan program/kegiatan untuk tahun 2023 dengan memperhatikan kedua aspek tersebut, disamping ketersediaan dana Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Hasil kegiatan Bappeda Tahun 2021 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan yang secara fisik dapat mencapai sebesar 97,31%. Hal ini dikarenakan terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Adapun secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2021 diuraikan pada tabel tentang Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2021. Sedangkan secara singkat beberapa hasil kegiatan utama tahun 2021 dan realisasi tahun 2022 sampai dengan bulan Juni dapat diuraikan sebagai berikut :

Secara lebih rinci Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD dapat dilihat pada Tabel 2.1.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Tugas Pokok BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya ;
- c. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi ;
- d. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan perencanaan tata ruang ;
- e. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi di bidang pengendalian, penelitian, pengembangan serta pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah;
- f. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah ;
- g. dan pengelolaan urusan kesekretariatan.

Dalam pelaksanaan tupoksinya, Bappeda tidak memiliki aturan mengenai SPM. Namun tolok ukur kinerjanya berdasarkan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pendukung perencanaan.

Selama ini ketepatan waktu tersebut selalu dapat dijaga dan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Tanah Laut. Baik dalam penyusunan dokumen perencanaan lingkup Kabupaten secara internal maupun dokumen sebagai pelaporan kepada pemerintah atasan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan SKPD dapat berasal dari beberapa unsur, sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia di bidang perencanaan pembangunan, dimana kualitas SDM perencana belum sesuai dengan yang dibutuhkan.
2. Kurang optimalnya koordinasi antar bidang di Bappeda sehingga pendelegasian tugas kurang berjalan optimal.
3. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan SKPD lain dalam mengatasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut.
4. Disiplin aparatur yang belum optimal.
5. Penyediaan dan penggunaan data-data statistik dan hasil penelitian lainnya yang kurang optimal dalam mendukung penyusunan dokumen perencanaan.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bappeda merupakan SKPD yang mengkoordinir kegiatan perencanaan lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Usulan kegiatan hasil musrenbang desa yang kemudian dilanjutkan dalam musrenbang kecamatan akan diteruskan ke SKPD dalam rangka penyempurnaan Rancangan Renja SKPD. Fungsi Bappeda adalah mengawal prioritas hasil musrenbang RKPD di Kecamatan yang telah disetujui oleh SKPD untuk dilaksanakan pada Tahun 2022 agar dimasukkan dalam Rancangan Renja SKPD dan menjadi salah satu bahan penyusunan RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023. Dengan demikian untuk usulan langsung dari masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Bappeda adalah terkait dengan perlunya dilakukan inovasi dan improvisasi agar kegiatan musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan dapat lebih optimal hasilnya.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

Dalam penyusunan Renja Bappeda Tahun 2023 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam renja Bappeda Tahun 2023 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1
Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi,
Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2023

Kebijakan Nasional	Kebijakan Provinsi	Prioritas pembangunan Kab. Tanah Laut	Program dalam Renja 2023
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	1. Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2. Optimalisasi Sektor Industri, Ukm, Pertanian Dan Pariwisata	2. Peningkatan Kualitas SDM, Akuntabilitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2. Program perencanaan, Pengendalian Dan evaluasi pembangunan Daerah
3. Meningkatkan Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	3. Memperkuat Infrastruktur Untuk Penuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah	3. Pemantapan Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan		4. Program Penelitian dan Pengembangan daerah

Kebijakan Nasional	Kebijakan Provinsi	Prioritas pembangunan Kab. Tanah Laut	Program dalam Renja 2023
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Yang Fokus Pada Pelayanan Publik		
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	5. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana		
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Mewujudkan Kalsel Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara Dan Sebagai Pendukung Food Estate		



Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tujuan	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan dan kelitbangan daerah.	Persentase Kesesuaian Perencanaan RKPD dengan RPJMD	61,5	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD	Persentase keselarasan program yang dilaksanakan SKPD terhadap Program yang ada di RPJMD	90	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD.	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
	Persentase hasil kajian Bidang Perencanaan yang diwujudkan			Persentase program yang memenuhi target	90	Meningkatkan Pengendalian evaluasi Kinerja SKPD lingkup Kabupaten.	Peningkatan koordinasi dengan SKPD se Kabupaten.
			Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya	90	Meningkatkan kualitas perencanaan SKPD Lingkup bidang Sosial Budaya.	Mempertajam indikator sasaran kegiatan SKPD Lingkup bidang Sosial Budaya.
				Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya	90		
				Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan RKPD	90	Meningkatkan kualitas perencanaan SKPD Lingkup bidang Ekonomi dan SDA.	Mempertajam indikator sasaran kegiatan SKPD Lingkup bidang Ekonomi dan SDA.
				Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam	90		

			Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dg RKPD	90	Meningkatkan kualitas perencanaan SKPD Lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Mempertajam indikator sasaran kegiatan SKPD Lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
			Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah	90		
		Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kajian Bidang Perencanaan	90	Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan	Peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase terkelolanya administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian	90	Meningkatkan Kelancaran Pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, Perencanaan, pelaporan dan keuangan SKPD	Meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian laporan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan SKPD
			Persentase perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun	90		
			Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	90		

4.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Visi Misi Kabupaten Tanah Laut sesuai yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023, adalah Misi ketiga yaitu Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam hal ini Bappeda merupakan SKPD yang mendukung dalam peningkatan sistem pelayanan

kegiatan perencanaan dan mendukung partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan.

Tabel 3.3

Sasaran Bappeda Tanah Laut Tahun 2023
<p>Sesuai dengan tupoksinya Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan.</p> <p>Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none">perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan;pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan;pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan penelitian pengembangan;pelaksanaan administrasi Badan; danpembinaan UPT Badan; danpelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. <p>Sedangkan Uraian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilihat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">mengkoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam, sosial budaya, infrastruktur dan pengembangan wilayah, perencanaan makro dan penelitian dan pengembangan;

b. mengkoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang Nasional;

c. mengkoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Nasional;

d. mengkoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah;

e. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan ekonomi dan sumber daya alam;

f. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial dan sumber daya alam ;

g. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;

h. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang formasi dan pengadaan aparatur;

i. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang penjurangan karier dan fasilitasi profesi aparatur;

j. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan

k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4.3 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5	Penyediaan Bahan/Material
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
	1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
	1	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
	2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
3		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
	3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
4 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
1	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Dari pelaksanaan 4 (empat) program tersebut di atas kebutuhan dana indikatif adalah sebesar Rp. 11.820.151.709,00,- (Sebelas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah.)

Adapun secara rinci terkait dengan penjelasan dari setiap program berupa output dan outcome kegiatan dapat dilihat pada matrik Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Bappeda Tahun 2023 (terlampir).

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	76,61
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kegiatan perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun	100 %
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100 %
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian kegiatan administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian	100 %
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	20 Orang

		Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100 %
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
1.4.5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	200 Laporan
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
1.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	10 Unit

		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan mesin dan lainnya yang dipelihara	10 Jenis

1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kesesuaian antara pagu RPJMD dan RKPD	85 %
2.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pelaksanaan penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100 %
2.1.1	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen
2.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %
2.2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Masukan
2.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan	100 %

		Pembangunan Daerah	
2.3.1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8 Laporan
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kesesuaian antara pagu RPJMD dan RKPD bidang perencanaan sosial budaya	85 %
3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase capaian kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %
3.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen
3.1.2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	25 Perangkat Daerah
3.1.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen

3.1.4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	8 Perangkat Daerah
3.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomiandan SDA (Sumber Daya Alam)	presentase capaian kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %
3.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen
3.2.2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	6 Perangkat Daerah
3.2.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen
3.2.4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan	3 Perangkat Daerah

		Evaluasi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	
3.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase capaian kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %
3.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
3.3.2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	1 Perangkat Daerah
3.3.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
3.3.4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	2 Perangkat Daerah
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang di tindaklanjuti	80 %

4.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase capaian hasil kajian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %
4.1.1	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan
4.1.2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan
4.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan	80 %
4.2.1	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen
4.3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase capaian hasil kajian Pengembangan Inovasi dan Teknologi	50 %
4.3.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Bappeda.

Pendanaan daerah untuk pelaksanaan program/kegiatan tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut 2023.



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Misi ketiga RPJMD yaitu "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)".

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023.

Pagu Indikatif yang terdapat dalam Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Tanah Laut disusun dengan memperhatikan ketersediaan dana Daerah untuk pelaksanaan program/kegiatan tersebut.

Kepala Bappeda

ANDRIS EYONY, S.STP, M.Si
NIP.19790928 199711 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 25 Tahun 2022

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan lampiran VI bagian E poin E.2 b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut;
 - b. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 maka diperlukan penyusunan rencana tahunan;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437); yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLRI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ;

20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
21. Peraturan Daerah Tanah Laut nomor 02 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020;
25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 85 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut tentang tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bappeda Tahun 2023.
- Kedua : Rencana Kerja (Renja) SKPD Bappeda Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum Pertama tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Kerja (Renja) SKPD Bappeda Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum Kedua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tanah Laut dan dipergunakan sebagai acuan bagi Bappeda Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan evaluasi capaian kinerja SKPD.
- Keempat : Agar seluruh personil di Bappeda Kabupaten Tanah Laut mempedomaninya serta melaksanakan dengan segala kesungguhan dan penuh rasa tanggung jawab.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada Tanggal : Juli 2022

KEPALA BAPEDA
KABUPATEN TANAH LAUT,

ANDRIS EVONY, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19790928 199711 1 001

LAPORAN KINERJA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
BULAN JULI TAHUN 2022

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Output Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				8.028.919.744	4.408.107.411	54,90	35,47
5.01	PERENCANAAN				7.893.014.256	4.405.497.211	55,82	55,95
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	75 nilai		7.098.960.974	4.125.352.513	58,11	65,76
5.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kegiatan perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun	100%		9.999.501	6.202.000	62,02	80,00
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	6 dokumen	3 dokumen	4.999.501	2.797.000	55,95	80,00
5.01.01.2.01.03	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan SKPD yang tersusun	5 dokumen	4 dokumen	5.000.000	3.405.000	68,10	80,00
5.01.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%		5.809.154.485	3.421.623.941	58,90	67,50
5.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan TPP ASN Bappeda yang terbayarkan	12 bulan	7 bulan	5.799.156.390	3.416.839.741	58,92	70,00
5.01.01.2.02.04	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	5 Dokumen	4 dokumen	9.998.075	4.784.200	47,88	65,00
5.01.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase capaian kegiatan administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian	100%		15.000.000	600.000	4,00	30,00
5.01.01.2.05.11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	3 ASN	1 ASN	15.000.000	600.000	4,00	30,00

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Output Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi:	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
5.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase capaian kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100%		622.061.246	350.410.985	56,33	62,00
5.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen listrik	11 jenis	8 jenis	9.653.959	4.397.000	45,54	60,00
5.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	70 jenis	56 jenis	119.434.449	46.073.100	38,58	65,00
5.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	5 jenis	6 jenis	54.500.835	26.016.328	47,74	70,00
5.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan	1 jenis	1 jenis	3.480.000	180.000	5,17	40,00
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	(1) Jumlah Perjalanan Dinas, (2) Jumlah Rapat	(1) 100 kali (2) 200 kali	85 kali 40 kali	434.990.000	273.742.537	62,93	75,00
5.01.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase capaian kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		66.524.698	56.300.000	84,63	100,00
5.01.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarpras gedung kantor yang diadakan atau Bangunan Lainnya	4 unit	4 unit	66.524.698	56.300.000	84,63	100,00
5.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase capaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		471.277.417	249.022.057	52,84	61,90
5.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	4 jenis	4 jenis	120.352.500	46.389.108	38,54	38,00
5.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	(1) jumlah jenis alat kebersihan, (2) jumlah PTT yang dibayarkan honorarnya	(1) 24 jenis, (2) 14 Orang	23 jenis 14 orang	330.924.917	202.632.949	57,74	65,00
5.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase capaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		104.943.647	41.193.550	39,25	58,89

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Output Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi:	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
5.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dari pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit	11.998.152	6.751.250	56,27	58,33
5.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan penjaminan kendaraan dinas operasional atau lapangan	(1) Jumlah Kendaraan Dinas roda 2 yang dipelihara (2) Jumlah Kendaraan Dinas roda 4 yang dipelihara	(1) 10 Unit (2) 6 Unit	6 unit 6 unit	68.195.495	25.904.600	37,99	58,33
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan mesin dan lainnya yang dipelihara	5 jenis	5 jenis	24.750.000	8.537.500	34,49	60,00
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kesesuaian antara pagu RPJMD dan RKPD	85%		677.911.641	270.951.498	39,97	73,33
5.01.02.2.01	Penyusunan perencanaan dan pendanaan	Persentase capaian kegiatan Penyusunan Perencanaan dan pendanaan	100%		495.391.641	154.506.498	31,19	70,00
5.01.02.2.01.07	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	(1) Jumlah Dokumen RKPD, (2) Jumlah Dokumen RKPD Perubahan	(1) 1 dokumen, (2) 1 dokumen	(1) 1 dokumen	495.391.641	154.506.498	31,19	70,00
5.01.02.2.02	Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%		100.000.000	98.645.000	98,65	100,00
5.01.02.2.02.01	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Analisis Standar Belanja	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	98.645.000	98,65	100,00
5.01.02.2.03	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%		82.520.000	17.800.000	21,57	50,00
5.01.02.2.03.03	Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	(1) Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi berkala Pembangunan Daerah (2) Jumlah Dokumen Monitoring Pelaksanaan Dana DAK	(1) 4 dokumen (2) 4 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	82.520.000	17.800.000	21,57	50,00

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Output Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi:	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kesesuaian antara pagu RPJMD dan RKPD bidang perencanaan sosial budaya, bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	90%		116.141.641	9.193.200	7,92	28,75
5.01.03.2.01	Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase capaian kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%		39.999.289	5.398.200	13,50	38,75
5.01.03.2.01.01	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJM dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Politik & Pemerintahan	4 laporan	1 laporan	4.999.900	525.000	10,50	25,00
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Moner Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Politik dan pemerintahan	1 dokumen		14.999.775	378.800	2,52	25,00
5.01.03.2.01.05	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJM dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia	4 laporan	1 laporan	4.999.954	3.207.300	64,15	80,00
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Jumlah Laporan Hasil Moner Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia	1 laporan		14.999.660	1.237.300	8,58	25,00
5.01.03.2.02	Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	presentase capaian kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%		38.755.096	2.595.000	6,70	25,00
5.01.03.2.02.01	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (lingkup Sub Bidang Pertaninadagkop	3 laporan		4.999.846	-	0,00	25,00

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Output Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi:	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Pertamindagkop	1 laporan		14.999.432	1.920.000	12,80	25,00
5.01.03.2.02.05	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi, Fasilitasi Terkait sub Bidang SDA, Bang Dunia Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5 laporan		3.764.611	675.000	17,93	25,00
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monvex Capaian Pembangunan SKPD lingkup sub Bidang SDA, Bang Dunia Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 laporan		14.991.207	-	0,00	25,00
5.01.03.2.03	Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase capaian kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%		37.387.256	1.200.000	3,21	22,50
5.01.03.2.03.01	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infrastruktur	5 laporan		9.900.988	-	0,00	25,00
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi capaian pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Infrastruktur	1 laporan		10.050.985	-	0,00	10,00
5.01.03.2.03.05	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sub Bidang Pengembangan Wilayah	5 laporan		3.365.140	1.200.000	33,66	45,00
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah	1 laporan		13.870.140	-	0,00	10,00

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/ Output Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi:	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				135.905.488	2.610.200	1,92	15,00
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	75%		135.905.488	2.610.200	1,92	15,00
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase capaian hasil kajian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100%		40.586.701	-	0,00	0,00
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen	1 dokumen		40.586.701	-	0,00	0,00
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil kajian Bidang Sosial dan Kependudukan	100%		45.320.000	2.610.200	5,76	30,00
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Kajian	1 dokumen		45.320.000	2.610.200	5,76	30,00
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase capaian hasil kajian Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100%		49.998.787	-	0,00	0,00
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perakayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen	1 dokumen		49.998.787	-	0,00	0,00

Pejabat, 03 Agustus 2022

Kepala Bappeda


Andris Evony, S.STP, M.Si
NIP. 19790928 199711 1 001

Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/MD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	01						10,074,028,427								11,380,000,000					
5	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KOM	nilai		nilai	76.61 nilai	8,771,939,808			76.61 nilai	9,680,000,000				
5	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kegiatan perencanaan dan Pelapran Kinega SKPD yang tertutun	%		%	100 %	19,997,295			100 %	30,000,000				
5	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	9.997.295	Kab. Tanah Laut, Pelatihan, Pelatihan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Peningkatan Kualitas SDM Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	Bappeda Kab. Tanah Laut	7 Dokumen	15.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	10.000.000	Kab. Tanah Laut, Pelatihan, Pelatihan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Peningkatan Kualitas SDM Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	Bappeda Kab. Tanah Laut	5 Laporan	15.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	%		%	100 %	7,438,736,653					100 %	7,015,000,000		
5	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 orang/bulan	7.423.737.233	Kab. Tanah Laut, Pelatihan, Pelatihan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Peningkatan Kualitas SDM Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	Bappeda Kab. Tanah Laut	36 orang/bulan	7.000.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	14.999.420	Kab. Tanah Laut, Pelatihan, Pelatihan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Peningkatan Kualitas SDM Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	Bappeda Kab. Tanah Laut	5 Dokumen	15.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian kegiatan administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian	%		%	100 %	63,800,000					100 %	200,000,000		
5	01	01	2.05	02		Pengadaan Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	33.800.000	Kab. Tanah Laut, Pelatihan, Pelatihan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Peningkatan Kualitas SDM Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	Bappeda Kab. Tanah Laut	1 Paket	50.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	30.000.000	Kab. Tanah Laut, Pelatihan, Pelatihan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Peningkatan Kualitas SDM Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	Bappeda Kab. Tanah Laut	20 Orang	150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.05			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kegiatan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	682.242.974					100 %	1,135,000,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.980.790	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Peningkatan Kualitas SDM Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	Bappeda Kab. Tanah Tanah Laut	1 Paket	25.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	97.456.634	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Peningkatan Kualitas SDM Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	Bappeda Kab. Tanah Tanah Laut	1 Paket	145.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	55.805.550	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Peningkatan Kualitas SDM Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	Bappeda Kab. Tanah Tanah Laut	2 Paket	85.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.000.000	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Peningkatan Kualitas SDM Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	Bappeda Kab. Tanah Tanah Laut	1 Dokumen	5.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	11.000.000	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Peningkatan Kualitas SDM Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	Bappeda Kab. Tanah Tanah Laut	2 Paket	25.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	500.000.000	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Peningkatan Kualitas SDM Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	Bappeda Kab. Tanah Tanah Laut	200 Laporan	850.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	417.262.886						100 %	505.000.000	
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	123.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Peningkatan Kualitas SDM Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	Bappeda Kab. Tanah Laut	12 Laporan	130.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	324.262.886	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Peningkatan Kualitas SDM Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	Bappeda Kab. Tanah Laut	12 Laporan	375.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	119.900.000						100 %	545.000.000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	30.000.000	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Peningkatan Kualitas SDM Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	Bappeda Kab. Tanah Laut	1 Unit	20.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	65.900.000	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Peningkatan Kualitas SDM Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	Bappeda Kab. Tanah Laut	15 Unit	90.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	24.000.000	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Peningkatan Kualitas SDM Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	Bappeda Kab. Tanah Laut	10 Unit	35.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kesesuaian antara pagu RPJMD dan RKPD	%		%	85 %	1.149.415,513						85 %	1.400.000.000		
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pendanaan	%		%	100 %	941.660.147						100 %	1.000.000.000		
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Daerah Kabupaten/Kota (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	941.660.147	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Peningkatan Kualitas SDM Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	SKPD Se Kab. Tanah Laut	3 Dokumen	1.000.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	%		%	100 %	100.000.000						100 %	150.000.000		
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Masukan	100.000.000	Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Peningkatan Kualitas SDM Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	SKPD Kab. Tanah Laut	1 Masukan	150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	%		%	100 %	107.755.366						100 %	250.000.000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				8 Laporan	107,755,366	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik/hankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Peningkatan Kualitas SDM Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	SKPD Se Kab. Tanah Laut	8 Laporan	250,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kesesuaian antara pagu RPJMD dan RKPD, bidang perencanaan sosial budaya	%		%	85 %	152,673,106						85 %	300,000,000	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase capaian kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%		%	100 %	59,944,106						100 %	100,000,000	
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	11,399,700	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik/hankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Peningkatan Kualitas SDM Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	SKPD Kab. Tanah Laut	2 Dokumen	20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	17,319,250	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik/hankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Peningkatan Kualitas SDM Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	SKPD Kab. Tanah Laut	1 Laporan	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	8,024,700	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik/hankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Peningkatan Kualitas SDM Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	SKPD Kab. Tanah Laut	2 Dokumen	20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia				8 Perangkat Daerah	23,199,856	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik/hankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Peningkatan Kualitas SDM Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	SKPD Kab. Tanah Laut	8 Perangkat Daerah	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	presentase capaian kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%		%	100 %	38,249,000						100 %	100,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	6.674.000	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Peningkatan Kualitas SDM Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	SKPD Kab. Tanah Laut	3 Dokumen	20.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				5 Perangkat Daerah	14.960.000	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Peningkatan Kualitas SDM Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	SKPD Kab. Tanah Laut	5 Perangkat Daerah	30.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	6.900.000	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Peningkatan Kualitas SDM Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	SKPD Kab. Tanah Laut	2 Dokumen	20.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA				3 Perangkat Daerah	10.615.000	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Peningkatan Kualitas SDM Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	SKPD Kab. Tanah Laut	3 Perangkat Daerah	30.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase capaian kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%		%	100 %	54.480.000							100 %	100.000.000	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	9.740.000	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Peningkatan Kualitas SDM Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	SKPD Kab. Tanah Laut	1 Dokumen	20.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur				1 Perangkat Daerah	10.920.000	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Peningkatan Kualitas SDM Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	SKPD Kab. Tanah Laut	1 Perangkat Daerah	30.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	24.700.000	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Peningkatan Kualitas SDM Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	SKPD Kab. Tanah Laut	1 Dokumen	20.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan				1 Perangkat Daerah	9.120.000	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Peningkatan Kualitas SDM Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	SKPD Kab. Tanah Laut	1 Perangkat Daerah	30.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							181.548.500							700.000.000	
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil keltibangan yang di tindaklanjuti	%		%	80 %	181.548.500							80 %	700.000.000	
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase capaian hasil kajian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	%		%	100 %	56.820.000							100 %	300.000.000	
5 05 02 2.01 05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi				1 Laporan	26.410.000	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Peningkatan Kualitas SDM Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	SKPD	1 Laporan	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Keltibangan dan Peraturan	Jumlah Data Keltibangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	28.410.000	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Peningkatan Kualitas SDM Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	SKPD	1 Laporan	200.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan	%		%	100 %	26.260.000							100 %	200.000.000	
5 05 02 2.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	26.260.000	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Peningkatan Kualitas SDM Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	SKPD	1 Dokumen	200.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase capaian hasil kajian Pengembangan Inovasi dan Teknologi	%		%	100 %	98.468.500							100 %	200.000.000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/MD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekajasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekajasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	98,468,500	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukuhankem Dan Transformasi Pelayanan Publik	02. Peningkatan Kualitas SDM Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	SKPD	1 Dokumen	200.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
TOTAL										10,255,576,927							12,080,000,000		